

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Rikky I. Aritonang
NPP. 29.0159

*Asdaf Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Keuangan Publik*

Email: rick

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Humbang Hasundutan Regency is an autonomous region that has less local revenue, so it has a dependence on central government transfer funds which directly affect the implementation of regional autonomy. **Objectives:** The purpose of this study was to determine the level of regional financial capacity of Humbang Hasundutan Regency in supporting the implementation of regional autonomy based on financial ratio analysis, as well as to determine the factors that hinder regional financial capacity and the efforts made to improve regional financial capacity. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results show that the level of regional financial capacity of Humbang Hasundutan Regency is still low from 2017-2020 with a degree of fiscal decentralization 8.41%, the ratio of regional financial independence 10.93%, the ratio of regional financial dependence 74.10%, effectiveness of local revenue 140.98%. Based on the results of the financial analysis, the government needs to create strategic efforts to maximize the potential of the region as a source of regional revenue, both in the form of extensification and intensification of regional revenue sources. **Conclusion:** the conclusion in this study shows that the level of regional financial capacity of Humbang Hasundutan Regency is still low because there are several inhibiting factors.

Keywords: *Analysis, Regional Financial Capability, Regional Autonomy*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan daerah otonom yang memiliki pendapatan asli daerah yang kurang, sehingga memiliki ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat yang langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan analisis rasio keuangan, serta untuk mengetahui faktor yang menghambat kemampuan keuangan daerah dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan

pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang masih rendah dari tahun 2017-2020 dengan derajat desentralisasi fiskal 8,41%, rasio kemandirian keuangan daerah 10,93%, rasio ketergantungan keuangan daerah 74,10%, efektivitas pendapatan asli daerah 140,98%. Berdasarkan hasil analisis keuangan tersebut pemerintah perlu menciptakan upaya yang strategis untuk memaksimalkan potensi daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah baik dalam bentuk ekstensifikasi maupun intensifikasi terhadap sumber penerimaan daerah. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang masih rendah karena ada beberapa faktor penghambat.

Kata kunci: *Analisis, Kemampuan Keuangan Daerah, Otonomi Daerah*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan penyelenggaraan otonomi kepada daerah otonom dengan seluas-luasnya ditandai melalui adanya aturan tentang Otonomi Daerah yang termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya aturan tersebut bertujuan agar senantiasa setiap pemerintah daerah mampu melaksanakan otonomi daerah yang baik. Reformasi dibidang keuangan adalah strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai target pembangunan nasional. Pemerintah melakukan perubahan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian muncul PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengelola keuangan daerah untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengurus pendapatan atas potensi sumber pendapatan yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahannya. Desentralisasi fiskal menjadi dasar dalam pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan, memperoleh dana dari pemerintah pusat, memastikan belanja daerah sehingga diberikan peluang buat mengendalikan pengelolaan anggaran sendiri tanpa Pemerintah Pusat.

Pemerintah daerah diharuskan berdiri sendiri untuk membiayai pemerintahannya dan tidak terikat pada dana transfer pemerintah pusat dan provinsi dalam sektor keuangan. Namun, dalam proses realisasinya masih banyak bergantung kepada transfer pemerintah pusat. Keadaan ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, supaya termotivasi untuk mandiri dari naungan pemerintah pusat dan seharusnya lebih berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang terdapat di daerah masing-masing. Ketergantungan akan bantuan pusat harus dikurangi, agar peran Pendapatan Asli Daerah dapat lebih dominan di tubuh pemerintah daerah sebagai sumber dana pemerintah. Dengan demikian, akan terlihat peranan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya menjadi lebih besar. Berdasarkan pernyataan tersebut, mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi-potensi sumber pendapatan yang bisa dikembangkan. Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Sumatera Utara. Kabupaten Humbang Hasundutan

merupakan daerah otonom yang memiliki potensi-potensi pendapatan daerah yang besar sebagai sumber pendapatan asli daerah. Dengan melihat dari berbagai aspek wilayah yang strategis, memungkinkan banyaknya potensi pendapatan yang sangat menguntungkan seperti pariwisata dan hasil sumber daya alamnya. Namun, setelah dilihat dari hasil Pendapatan Asli Daerah masih tergolong kecil, dapat dilihat dari perolehan pendapatan yang belum memberikan dampak yang dominan baik dari pemungutan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Keadaan tersebut akan memunculkan anggapan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan belum mampu menyelenggarakan otonomi daerah bila hal tersebut tidak ditangani. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan harus bisa meningkatkan lagi pengelolaan sumber daya yang ada dan mengali lagi potensi-potensi sumber pendapatan, seperti meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan pengelolaan pariwisata, dan juga sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintahan yang bersangkutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisa keuangan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan judul penelitian “**Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara**”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Pemerintah daerah diharuskan berdiri sendiri untuk membiayai pemerintahannya dan tidak terikat pada dana transfer pemerintah pusat dan provinsi dalam sektor keuangan. Namun, dalam proses realisasinya masih banyak bergantung kepada transfer pemerintah pusat. Keadaan ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, supaya termotivasi untuk mandiri dari naungan pemerintah pusat dan seharusnya lebih berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang terdapat di daerah masing-masing. Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Sumatera Utara. Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan daerah otonom yang memiliki potensi-potensi pendapatan daerah yang besar sebagai sumber pendapatan asli daerah. Dengan melihat dari berbagai aspek wilayah yang strategis, memungkinkan banyaknya potensi pendapatan yang sangat menguntungkan seperti pariwisata dan hasil sumber daya alamnya. Namun, setelah dilihat dari hasil Pendapatan Asli Daerah masih tergolong kecil, dapat dilihat dari perolehan pendapatan yang belum memberikan dampak yang dominan baik dari pemungutan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sehingga dengan banyaknya potensi yang dimiliki Daerah Humbang Hasundutan, maka menjadi kesenjangan antara potensi Sumber Daya dengan PAD yang didapatkan tiap tahunnya yang menjadi suatu hal menarik untuk diteliti.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang digunakan sebagai acuan oleh peneliti baru guna menyempurnakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tersebut. Maka dari itu, penulis telah memilih beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan dalam meneliti penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh (**Susanto, 2019**) yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram dengan menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Efektivitas PAD sudah sangat baik namun untuk rasio kemandirian, pertumbuhan, efisiensi dan aktivitas dinilai masih sangat kurang.

Penelitian yang kedua diambil dari penelitian yang dilakukan oleh (Retno dkk, 2019) yang berjudul Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah metode penelitian analisis deskriptif kuantitatif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kemampuan dan kemandirian keuangan daerah Jawa Tengah masih rendah, serta kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Amir dkk, 2018) yang berjudul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sigi Sebagai Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran dengan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sigi masih sangat kurang. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Sianifar dan afandi, 2016) dengan judul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan rasio keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih sangat rendah dan belum mampu menunjang pelaksanaan otonomi daerah, tetapi pemerintah Kabupaten Labuhan batu Selatan bias melaksanakan tugas pemerintahan, yaitu penyediaan pelayanan public dan pembangunan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan dana transfer dari pemerintah pusat maupun propinsi dapat dikelola dengan optimal dimana anggaran pendapatan daerah dialokasikan lebih besar pada belanja pembangunan dari pada belanja pegawai. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (Lilis, 2008) yang berjudul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Gresik dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah belum berjalan dengan efektif karena hasil rasio menunjukkan hasil yang kurang dari standar.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari segi lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2019) yang berlokasi di Mataram, selain itu penelitian Retno (2019) yang berlokasi di Jawa Tengah, dan penelitian yang dilakukan oleh Amir dan kawan kawan (2018) yang berlokasi di Kabupaten Sigi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Selain dari segi lokus, penelitian yang dilakukan oleh penulis juga metode pendekatan yang digunakan yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sianifar dan afandi, 2016) menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan rasio keuangan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan analisis rasio keuangan, serta untuk mengetahui faktor yang

menghambat kemampuan keuangan daerah dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 5 orang yang diambil dari Kepala Badan PengeLoJa Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori analisis yang dikemukakan oleh Komarudin (2001: 53) yang mengatakan bahwa “Analisis adalah proses berfikir untuk memecahkan suatu keutuhan menjadi elemen-elemen sehingga dapat mengenali elemen tersebut, mengetahui hubungan antara satu sama lain serta fungsi masing-masing elemen.

3.1. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

a. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi mampu menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendanai otonomi daerah. Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya. Pada tahun 2017 berada di angka 9,00% pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 naik menjadi 10,10%, lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 7,32% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tipis ke angka 7,23%. Sehingga Kabupaten Humbang Hasundutan dalam 4 tahun anggaran terakhir mempunyai rata-rata derajat desentralisasi pada persentase 8,41%. Rasio derajat diukur menggunakan skala interval maka masih berada di skala 0,00 – 30,00. Hal tersebut dapat menandakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal yang dimiliki Kabupaten Humbang Hasundutan pada skala interval dikategorikan cukup. Untuk menetapkan target pendapatan daerah harus menganalisa kondisi riil di lapangan seperti kemampuan potensi daerah yang dimiliki sehingga mampu untuk mencapai target yang ditetapkan. Serta pendapatan daerah yang lebih ditekankan dalam melakukan penyesuaian target pendapatan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen yang pendapatan yang langsung dikelola oleh daerah itu sendiri, maka dari itu dalam melakukan penetapan target diserahkan kepada pemerintah daerah dan juga dengan melihat potensi

dari sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Humbang Hasundutan dalam tahun anggaran tersebut. **b. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**, Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah secara mandiri, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dimana masyarakat telah membayar pajak dan retribusi dengan tertib sebagai sumber pendapatan daerah. tingkat kemandirian kemandirian keuangan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami fluktuasi yaitu terjadinya turun naik. Tingkat rasio yang paling rendah terjadi pada tahun 2019 yang berada pada angka 9,59% dan sebaliknya tingkat rasio yang paling tinggi sebesar 12,89% pada tahun 2018 sementara pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari 2019 menjadi 9,78%. Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki kemandirian keuangan daerah yang memiliki rata-rata 10,93% (2017-2020). Jika diukur menggunakan skala interval pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah, Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki skala interval dibawah 25% yang menunjukkan bahwa kemampuan keuangan yang rendah dan juga memiliki pola hubungan yang instruktif. Pola hubungan instruktif menyimpulkan bahwa peran pemerintah pusat masih sangat mendominasi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan tingkat penggunaan dana yang berasal dari PAD masih sangat minim sehingga penilaian atas kemandirian daerah masih sangat rendah dan daerah ini termasuk kedalam daerah yang tidak sanggup melaksanakan otonomi daerah. **c. Analisis Rasio Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah**, Rasio derajat tingkat ketergantungan keuangan daerah bertujuan untuk mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan eksternal khususnya pendapatan transfer. tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, yaitu masih berada di atas angka 60% dalam 4 tahun anggaran terakhir yaitu 2017-2020. Pada setiap tahun anggarannya mengalami perubahan yang baik dengan menurunnya tingkat ketergantungan dan sebaliknya. Hasil perhitungan rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah pada Kabupaten Humbang Hasundutan mencapai angka rata-rata 60% yang dimana jika di ukur menggunakan skala interval angka tersebut masih berada pada skala $>50,00$. Skala tersebut menandakan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan masih berada pada interval yang sangat tinggi. **d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, Rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan daerah yang telah direncanakan sehingga realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dengan didasarkan potensi riil daerah. tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan terjadinya penurunan yaitu disetiap tahunnya dan secara umum tingkat efektivitasnya memiliki rata-rata 140,98% hal tersebut masih dikategorikan sangat efektif dalam tahun anggaran 2017-2020. Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki pengelolaan keuangan berada diatas 100% yaitu sangat efektif. Kondisi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki dijadikan sebagai sumber penerimaan. Apabila potensi tersebut sangat memadai maka akan menciptakan efektivitas yang baik dan begitu juga sebaliknya.

3.2. Faktor-faktor Penghambat Kemampuan Keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan

Otonomi daerah yang diserahkan pada daerah merupakan strategi Pemerintah Pusat dalam mendistribusikan pendapatan, membagi kekuasaan serta untuk meningkatkan perekonomian daerah karena pada era globalisasi ini daerah dituntut untuk memperkuat perekonomian nasional yang dimulai dari daerah dengan diberikannya kemandirian dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah

pusat. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dari Pemerintah Pusat kepada daerah akan meningkatkan program transfer fiskal dari pemerintah pusat maupun tingkat yang lebih tinggi kepada Pemerintah Daerah. Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pelaksanaan membiayai kegiatan pemerintahannya memiliki beberapa faktor yang menghambat tingkat kemampuan keuangan daerah secara internal. Faktor yang menjadi permasalahan dan yang paling berpengaruh dalam penyusunan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu Sumber Daya Manusia pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, Sistem dan aplikasi perpajakan daerah, pengetahuan masyarakat akan pajak dan retribusi daerah masih kurang, Kondisi ekonomi Makro yang buruk akibat covid-19, dan Masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak.

3.3. Upaya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) diberi kewenangan untuk menentukan besaran pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya diterima melalui penetapan target, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) harus menentukan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut besar atau kecil. Dalam hal ini upaya yang dimaksud yaitu bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut bisa bertambah dalam hal kapasitas atau jumlah sumber potensi yang bisa dijadikan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan bertambah dalam hal realisasi pemungutan. Tambahan dari segi kapasitas yaitu dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dapat digali secara maksimal sehingga tidak ada potensi yang terabaikan, karena di setiap daerah memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Berikutnya, dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mencapai target yang telah ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di tuntut untuk mencari peluang dengan cermat dan mencari strategi yang baik. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara peningkatan kemampuan personil atau SDM, Mengembangkan sistem dan aplikasi pajak, Integrasi data antara instansi, sensus pajak, dan Pengawasan pemungutan retribusi dan tarif yang ditetapkan

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sumber daya pengelola pajak daerah dan retribusi daerah Humbang Hasundutan mengalami permasalahan kualitas dan kuantitas sehingga dalam pemungutan pajak yang pernah dilakukan mendapat bantuan dari petugas satpol pp pada beberapa restoran yang merupakan wajib pajak di kecamatan Dolok Sanggul. Ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh personel pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Humbang Hasundutan belum optimal dan perlu pelatihan – pelatihan agar kualitas SDMnya meningkat guna mengesiesienkan kinerja BPKAD. Selain itu Kabupaten Humbang Hasundutan belum memiliki sistem atau aplikasi pajak yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam membayar pajak. Sehingga tidak jarang masyarakat kesulitan membayar pajak karena akses rumah yang jauh ke kantor pajak, oleh karena itu banyak masyarakat yang akhirnya juga tidak membayar pajak. Sehingga ini merupakan temuan yang penting bagi pemerintah daerah Humbang Hasandutan guna pengembangan pelayanan di bidang teknoloji dan inormasinya.

IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan harus mengoptimalkan pemanfaatan potensi riil Pendapatan Asli Daerah baik dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial dalam rangka meningkatkan derajat desentralisasi keuangan, meningkatkan kemandirian keuangan, memperkecil ketergantungan keuangan pusat, mengoptimalkan realisasi pendapatan asli daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat menyelenggarakan pemerintahan, membangun daerah Humbang Hasundutan serta meningkatkan pelayanan yang baik untuk masyarakat dan mampu untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan pengembangan kemampuan para personil atau pegawai pengelola pajak dan retribusi daerah dengan melakukan pelatihan secara berkala, melakukan pengembangan sistem dan aplikasi dengan merekrut ahli pada bidang sistem dan aplikasi untuk menambah aplikasi pengelolaan keuangan, mengakuratkan integrasi data antar satuan kerja, melakukan sosialisasi pajak berkala melalui media informasi, serta bertindak cepat dalam mengatasi dampak penurunan ekonomi nasional dengan melakukan rencana strategis serta melakukan sensus pajak berkala dan rutin untuk memperluas basis pajak sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat serta mendukung kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan analisis keuangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan analisis keuangan Pemerintah Daerah Humbang Hasundutan, sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Humbang hasundutan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian guna penggalan informasi dan data analisis sehingga menyelesaikan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Florenz. 2012. *A Comparative Analysis of the Financial Ratios of Listed Firms Belonging to the Education Subsector in the Philippines for the Years 2009-2011*. Philipines: De La Salle University.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Kuangan Daerah Seri Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- _____. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, UPP AMD YKPN.
- _____. 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah*. Yogyakarta: UGM
- _____. 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. UPP AMP YKPN.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat Daerah)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Elsye, rosmery. 2013. *Desentralisasi Fiskal Manajemen Pemerintahan*. Jatinangor: Alqaprint.
- Komarudin. 2001. *Ensiklopedia Manajemen, Edisi IX*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga
- Nataludiin. 2001. *Potensi dana perimbangan di pemerintahan daerah di provinsi Jambi, manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Samsu. 2017. *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)
- Sinurat, Marja. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2017. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Suwandi. 2015. *Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Yogyakarta: Deepublish.